

Pemakalah Pembicara

Seminar Nasional Laboratorium PPKn FKIP 2018 UNS

“Penguatan Nilai - Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Persekolahan dan Kemasyarakatan”

PEMBELAJARAN NILAI KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

(Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Pendidikan Ideologi Pancasila dan
Pembelajaran Nilai Kebangsaan Indonesia)

Suwarma Al Muchtar
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
e-mail : suwarma@gmail.com

Disampaikan dalam Seminar Nasional “Penguatan Nilai – Nilai Kebangsaan Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan” pada 7 Juli 2018

ABSTRACT

This study deals with how to build academic thinking for the revitalization of Civic Science, civic education and its implications for the Teacher Education system. In connection with the accelerated changes in social cultural values with the development of information technology and communications, develop paradigms and approaches in the social sciences. This study put forward the paradigm of citizenship science revitalization based on the philosophy of Pancasila science. Aims to strengthen Citizenship Education as an educational value of Pancasila ideology, in learning solving the problems of actual citizenship, using information technology and and appropriate communication in accordance with the purpose of building a believing citizen, devoted to God Almighty and have noble character

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dari refleksi pengalaman subyektif kajian epistemologik dan paradigmatik memperkuat eksistensi dan mutu Pendidikan PKn selama ini. Terutama dalam upaya memahami arah revitalisasi *Pembelajaran Nilai kebangsaan Pancasila* dalam PPkn Menemukan sejumlah fenomena dan fakta empirik yang menjadi latar masalah. Antara lain bahwa Perubahan sosial budaya sangat cepat telah menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga mempengaruhi terhadap masalah nilai sosial budaya. Kompleksitas masalah sosial semakin menguat ke arah *situasi trubulansi*. Kompleksitas menjadi karakteristik dari latar sosial budaya pendidikan bersifat dinamis sebagai latar Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam perkembangan ilmu sosial termasuk pendidikan, perkembangannya itu tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sehingga mengakibatkan kesenjangan, termasuk dalam masalah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Kondisi ini sebagai faktor terjadinya “krisis teori kontekstual” yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang semakin rumit. Secara khusus dalam kajian penguatan kebangsaan, memunculkan masalah bagaimana revitalisasi PKn dalam pembelajaran nilai-nilai kebangsaan? Masalah ini sangat mendesak untuk mengatasi melemahnya wawasan dan kecerdasan berbangsa dari warga negara. Masalah ini dalam teori dan konsep PKn berkaitan dengan pengembangan aplikasi pendekatan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila (Suwarma: 2017). Pendekatan ini untuk memperkuat pula konsep dan pendidikan Etika Pancasila dalam PPKn. Kondisi ini mempengaruhi terhadap pengembangan *epistemologi Ilmu Kewarganegaraan* dan Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menghadapi dampak pengaruh berbagai ideologi asing, didasarkan atas

dasar paradigma bahwa warga negara dapat melakukan menguatkan nilai kebangsaan sehingga memiliki kecerdasan berideologi, jika memperkuat pendekatan PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila, seara terintegrasi dengan pendekatan pendidikan politik Pancasila. Dengan demikian akan mempekokoh kompetensi waragnegara sebagai subyek dalam upaya memperkuat kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu globalisasi melahirkan dampak negatif ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah menipisnya nilai kebangsaan, Bergesernya nilai nasionalisme dan menjauhnya jati diri bangsa dari akar budaya bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi modern dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional.

Konsepsi Global citizenship education (GCE) tengah dikembangkan di negara Barat dengan paradigma bahwa Global citizenship education (GCE) is a form of civic learning that involves students' active participation in projects that address global issues of a social, political, economic, or environmental nature. The two main elements of GCE are 'global consciousness'; the moral or ethical aspect of global issues, and 'global competencies', or skills meant to enable learners to compete in the global jobs market. The promotion of GCE was a response by governments and NGOs to the emergence of supranational institutions, regional economic blocs, and the development of information and communications technologies. These have all resulted in the emergence of a more globally oriented and collaborative approach to education. UNESCO just released its new guidance tool Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers. The new publication will help policy-makers within ministries of education prioritize, plan and implement effective actions for the prevention of violent extremism through education, and contribute to national prevention efforts. (Suwama : 2017).

PPKn dihapakan kepada fenomena tersebut perlu memperkuat peran dalam upaya penguatan nilai nilai kebangsaan. Paradima penguatan nilai nilai kebangsaan dari diemnsi pendidikan nilai dengan menemukan kembali sumber nilai penguatannya, Dalam kajian ini diyakini bahwa masyarakat dan dalam konsepsi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan agama sebagai sumber Nilai-nilai kebangsaan. Diyakini pula bahwa kekuatan nilai kebangsaan berdasarkan nilai dasar dan ideologi negara merupakan kekuatan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi terhadap nilai kebangsaan, kenegaraan dan kewarganegaraan. Implikasi PPKn diadkan kepada bagaimana upaya penguatan baik dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai kebangsaan maupun dalam pembelajaran sebagai pembelajaran nilai kebangsaan untuk membangun kekokohan nilai kebangsaan dan kecerdasan warganegara dalam kehidupan bernegara. Atas dasar paradigma tersebut teridentifikasi sejumlah faktor yang merupakan latar belakang masalah dalam kajian ini, antara lain sebagai berikut;

- a. Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan munculnya pemikiran berdasar pada paham *neopositivisme dan neo strukturalisme* yang memberikan peluang bagi ilmu ilmu sosial termasuk Ilmu Kewarganegaraan untuk melakukan revitalisasi *epistemologinya* dalam membangun jatidiri keilmuannya. Termasuk bagi penataan hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dan masalah kebangsaan . Terutama dalam membangun sosok keilmuan yang bergerak dari tradisi pendekatan disipliner yang selama ini masih dominan ke arah interdisiplin, multidisiplin dan antardisiplin, bahkan kontradisiplin. Munculnya pendekatan *naturalistik inquiry* yang diunggulkan dalam ilmu ilmu sosial dan studi sosial serta humaniora dan keberagamaan. Dalam ilmu pendidikan terapan muncul Penelitian Tindakan kelas dalam Ilmu Keguruan serta Lesson studies dan dan SST dan STEM dalam pendidikan IPA dll, sebagai hasil inovasi.
- b. Perubahan terjadi seiring dengan perubahan tatanan global. Neo ideologi muncul yang dalam era gelobalisasi. Mempengaruhi implementasi dan kemurnian aktualisasi ideologi negara-negara berkembang, Termasuk mempengaruhi pula terhadap implementasi dan kemampuan warga negara Indonesia memahami, mengaktualisasikan mempekokoh

penguatan *kebangsaan dan ideologi Pancasila*. Masalah ini berkaitan dengan konsep untuk mengapa perlu memperkuat wawasan kebangsaan seiring dengan memperkuat dan *memperkuat kecerdasan berideologi* sebagai sarana dalam memperkuat wawasan kebangsaan. Hal ini diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan dan tujuan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar landasan konstitusional berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing

- c. PKN sebagai Civic Education Indonesia dihadapkan pada tantangan memperkuat kemampuan dalam Pengembangan Kurikulum dan pembelajarannya untuk mengatasi kelemahan yang selama ini dalam *pembelajaran nilai kebangsaan* untuk memperkuat kehidupan bernegara. Untuk itu perlu dibangun paradigma baru dalam memperkuat *pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn*. Pendidikan PPKn sebagai pendidikan nilai ideologi Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam *perspektif pendidikan nilai dan pendidikan ideologi Pancasila*
- d. Kecerdasan berideologi Pancasila diperlukan dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara. Adalah merupakan tantangan dalam upaya revitalisasi epistemologis termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan nilai kebangsaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat sejumlah masalah yang perlu segera mendapatkan perhatian komunitas Pkn. Terutama berkaitan dengan upaya membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi pembelajaran nilai kebangsaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dalam pengembangan model pembelajaran nilai kebangsaan. Antara lain sebagai berikut;

- a. Mengapa perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi untuk memperkuat model pembelajaran nilai kebangsaan di Indonesia
- b. Mengapa perubahan nilai sosial budaya, paradigma dalam Ilmu Ilmu sosial perlu dijadikan dasar pemikiran dalam pevitalisisasi Pendidikan PKN sebagai Pendidikan Ideologi untuk memperkuat pembelajaran nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila ?
- c. Mengapa teknologi informasi dan komunikasi perlu diintegrasikan secara tepat guna bagi revitalisasi pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Ideologi Pancasila dengan tujuan untuk membangun kecerdasan berideologi dalam memperkuat pembelajaran kebangsaan ?
- d. Mengapa filsafat Pancasila perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan landasan membangun teori pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan ?
- e. Mengapa diperlu dikembangkan model pembelajaran nilai kebangsaan berbasis masalah kewarganegaraan kontekstual berbasis Agama, ilmu pengetahuan, masyarakat dan teknologi yang terintegrasi dalam pendekatan pendidikan ideologi Pancasila
- f. Mengapa model pengembangan kurikulum perlu memuat nilai-nilai Pancasila dan masalah pembelajaran nilai kebangsaan dengan menekankan pada tujuan untuk membangun kompetensi warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia dalam mencintai bangsa negaranya

2. KAJIAN PARADIGMA REVITALISASI ILMU KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBEJARAN NILAI NILAI KEBANGSAAN

2.1. Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Ilmu sosial Implikasinya terhadap Revitalisasi Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Telah terjadi perubahan paradigma dalam ilmu ilmu sosial, sebagai koreksi dari positivisme, dan tumbuhnya neopositivisme dan neostrukturalisme, dengan berkembangnya naturalistik inquiry dalam memperkokoh epistemologi ilmu ilmu sosial. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- a. perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya, berpengaruh luar biasa terhadap epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada abad 21
- b. Sementara itu pendekatan disiplin, multidisiplin ke arah pendekatan krosdisiplin, termasuk yang bersifat contradisipliner, memberikan pengaruh terhadap kurikulum dan pembelajaran PKN sebagai pendidikan ideologi dalam pengembangan nilai –nilai kebangsaan dan berimplikasi terhadap sistem pendidikan guru PKN.
- c. Positivisme memiliki ekstrim yang dapat diselidiki atau diteliti hanyalah yang bersifat empirik realitas, fakta fakta dalam masyarakat. Sementara itu pendidikan nilai menekankan pada kedalaman berfikir dalam menemukan kebenaran dan mengkonstruksi makna kebenaran dibalik realitas.
- d. nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara itu dalam pendidikan nilai pemaknaan kebenaran lebih bersifat kontekstual dan berkaitan dengan nilai kearifan lokal termasuk dalam pengembangan pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan Pancasila dalam PPKn di Indonesia
- e. positivisme koreksi yang keras, perspektif pemikiran ilmu ilmu sosial budaya. Koreksi memunculkan aliran baru Post Positivisme. konstruktivisme yang dapat dijadikan peluang dalam memperkokoh pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan

2.2. Pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam Pengembangan Model Pendidikan Kewarganegaraan

Terdapat pemikiran dalam Ilmu kewarganegaraan yang melahirkan aliran tradisi dan model Pendidikan Kewarganegaraan yang mempengaruhi pemikiran pengembangan di berbagai negara termasuk di Indonesia dalam ragam pendekatan sebagai berikut;

- a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Studies)
- b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik bagi dari sosialisasi politik dan komunikasi politik
- c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi, bagian dari ilmu politik inti dari sistem politik
- d. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hak Azasi Manusia, bagian dari upaya penegakkan HAM.
- e. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Kesadaran berkonstitusi bagian dari sosialisasi hukum Tata Negara
- f. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan Hukum untuk membangun kesadaran hukum bagian dari sosiologi hukum
- g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Etika politik, bagian dari filsafat politik
- h. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Guru PKN yang mempersiapkan guru profesional Pancasila, bertaraf universitas, bagian dari ilmu keguruan dan ilmu Pendidikan

- i. Pendidikan Kewarga Negeraan sebagai Pendidikan disiplin ilmu Kewarga Negeraan, bagian dari ilmu Pendidikan

2.3. Paradigma Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam PPKn Sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila

Kuatnya pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam sehingga melahirkan pemikiran baru terhadap perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran sebagai pendidikan dan pembelajaran nilai. Setelah paham kognitif tidak berhasil mengembangkan kemampuan warganegara untuk membangun sistem nilai. Kemampuan ini sebagai dasar bersikap dan bertindak sebagai warga negara yang baik. Awalnya dikembangkan sebagai pendidikan moral, kemudian dirubah menjadi pendidikan nilai, dan kini di kembangkan menjadi pendidikan karakter. Berikut ini pemikiran hipotetik paradigmatis, sebagai reflektif empirik subyektif ke arah pemikiran revitalisasi dan inovasi sebagai pendidikan ideologi dan pembelajaran nilai kebangsaan Antara lain sebagai berikut;

- a. PKN multi sumber dan kontekstual ilmu pendidikan ilmu keguruan Ilmu Sosial, humaniora, sains teknologi dan agama dan masalah kewarganegaraan dengan mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- b. Globalisasi merupakan latar dan lingkungan dan modal sosial potensial untuk memperkuat PPKn sebagai pendidikan ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan
- c. Proses pembelajaran PPKn, ditransformasikan pada strategi pembelajaran yang pengembangan berfikir dan nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dengan dukungan pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis masalah kebangsaan dan kewarganegaraan aktual
- d. Era globalisasi merupakan kompetitif global antar bangsa. perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Daya tahan ideologi dan wawasan kebangsaan terletak pada kecerdasan berideologi warganegara. Revitalisasi PKN sebagai Pendidikan Nilai kebangsaan berkaitan dengan memperkuat pendekatan pendidikan Ideologi Pancasila sebagai salah satu pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran nilai kebangsaan, yaitu nasionalisme Pancasila.
- e. Tuntutan terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah semakin tinggi dalam situasi ancaman disintegasi serta pengaruh ideologi asing adalah merupakan tantangan untuk memperkuat pendekatan filosofik Ilmu Kewarganegaraan dalam memberikan landasan teoretik terhadap mengembangkan Kurikulum dan Pembelajaran termasuk dalam pembelajaran nilai kebangsaan dalam PKN sebagai pendidikan ideologi Pancasila
- f. Masalah utama dalam revitalisasi adalah pemikiran untuk membangun teori dan paradigma baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru yang menjadi latar Pendidikan Kewarganegaraan.
- g. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Guru PKN yang profesional Pancasila, perlu mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan guru profesional. Adalah merupakan penentu keberhasilan pemikiran revitalisasi dan aktualisasi

2.4. Refleksi Pemikiran Pengembangan PPKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan

Penguatan pembelajaran nilai kebangsaan dalam PPKn, menuntut penguatan terhadap pendekatan sebagai pendidikan ideologi Pancasila. Pendidikan Nilai kebangsaan selama ini masih belum optimal dikembangkan, seiring masih menguatnya paham pemikiran positivistik dan behavioristik dan kognitif dalam ilmu pendidikan dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora sebagai sumber keilmuan PPKn Berikut catatan reflektif subyektif empirik berkait dengan pengembangan pendidikan nilai kebangsaan dalam PPKn, antara lain sebagai berikut;

- a. pengembangan nilai-nilai kebangsaan hendaknya merupakan bagian penting dalam inovasi pembelajaran nilai dalam PPKn, terutama untuk memperkuat proses pembelajaran dalam mengimbangi pendekatan kognitif dan objectif model dalam pendidikan selama ini dalam praktek pembelajaran. Pendidikan Nilai kebangsaan merupakan proses transformasi dan aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membangun konsep kebangsaan dan nasionalisme sebagai sumber PPKn di Indonesia.
- b. Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajarn konstekstual Nilai kebangsaan memperkuat PPKn untuk pengembangan models pembelajaran nilai nilai kebangsaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kecerdsan berideologi warga negara.
- c. Pembelajaran nilai kebangsaan hendaknya dikembangkan dalam model pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan siswa dalam berpikir dalam kelompok dalam memecahkan masalah kebangsaan. Tujuannya antara mengembangkan kemampuan berpikir reflektif logis atas sejumlah fenomena dan masalah kewarganegaraan dan kebangsaan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Gejala dan fenomena melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap nilai nilai dan wawasan kebangsaan . Merupakan tantangan bagi revitalisasi PPKn dalam perspektif pendidikan ideologi dan pendidikan wawasan kebangsaan. Meliputi penguatan pemaknaan kebangsaan dan nasionalisme Pancasila, pengembangan kurikulum, pembelajaran dan pengembangan kemampuan profesional guru PPKn pendekatan bagi pengembangan Sistem pendidikan guru PPKn
- e. Peran PPKn dalam membangun kecerdasan berideologi merupakan kecerdasan ber-Pancasila. Meliputi pemahaman nilai nilai, kemampuan mengakan nilai dan mengamalkan serta kemampuan memelihara nilai-nilai dan dalam membangun cinta tanah air sebagai nilai dasar kebangsaan dan nasionalme Pancasila..
- f. Pendidikan Nilai kebangsaan akan berhasil manakala berorientasi pada membangun karakter cintan tanah air intinya karkter beriman kepada Tuhan Yang maha Esa untuk melahirkan warga negara memiliki kecerdasan berakhlaq mulia dan beriideologi berbangsa dan bernegara.
- g. Krisis pendidikan dan pembelajaran nilai dapat diatasi, dengan meyakini dan merivitalisasi landasan filsafat, teoretik pendikan ini sebagai pendidikan dan pembelajaran yang didukung dengan keokohan Ilmu Kewargaegraaan dan Pendidikan Guru Pendidikan Kewarganegaraan.
- h. Pembelajaran Nilai kebangsaan (teaching nationalism) Masalah aktual kewarganegaraan adalah altenatif solusi pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dari pada afektif dan psikomotor.

2.5. Peluang Revitalisasi Pendidikan Idelogi dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Guru PKn di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaran di PT sebagai lembaga pendidikan guru pada Universitas di LPTK di Indonesia, telah memiliki pengalaman dalam membangun guru dan pengembangan

Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Banyak memberikan pengaruh terhadap pengembangan profesional guru PKN . Baik aspek keilmuannya maupun dalam mengembangkan kemampuan guru dan dosen. Telah memiliki program pendidikan magister dan dokror, pemikiran reflektif empirik selama ini, dalam berbagai tulisan dan kegiatan ilmiah dalam AP3NI, antar lain sebagai berikut;

- a. Prodi Pendidikan Kewarga Negara sebagai Lembaga Pendidikan guru PKN pada LPTK memiliki pengalaman kepakaran dan potensi kelembagaan dalam mempersiapkan guru dosen dan pakar PKN profesional.
- b. Profesionalitas guru dosen menentukan keberhasilan revitalisasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran perlu direvitalisasi secara sistemik dengan dukungan kekuatan filosofik dan keilmuan.
- c. Pendidikan Guru PKn yang profesional dikembangkan dalam tradisi pendidikan Guru bertaraf Universitas. Merupakan aset bagi mengembangkan guru sebagai subyek yang mampu berkembang dalam melakukan inovasi kreatif dalam memperkuat mutu pembelajaran.
- d. Komunitas keilmuan pendidikan Kewarganegaraan mampu melahirkan pemikiran bagi pengembangan kekokohan filsafat ontologis, aksiologis dan epistemologis. Dapat keluar dari cengkaman Positivisme yang memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya, dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah (*that science is the highest form of knowledge and that philosophy thus must be scientific*).
- e. PKn profetik berbasis nilai kewahyuan yang praktisnya dalam kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia. Yang sudah terbukti memiliki eksistensi dan kekuatan sebagai sumber dan modal sosial bagi sistem sosial dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan akhlak mulia seperti diatur dalam UUD 1945.
- f. Positivisme hanya metode ilmiah yang berlaku secara umum, untuk segala bidang atau disiplin ilmu, yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Pandangan inilah yang menyamakan bidang ilmu sosial, ilmu pendidikan termasuk ilmu keguruan dan program pengembangan kurikulum pendidikan. Ternyata berdampak memperlemah pendidikan ilmu sosial termasuk dalam Ilmu kewarga negaraan. Kondisi ini memunculkan *pendekatan alamiah* dalam merevitalisasi epistemologinya, sehingga ditemukan pendekatan dan model *Naturalistic Inquiry*.
- g. Diduga paham positivisme dan kognitivisme memperlemah penelitian pembelajaran pendidikan kewarga negaraan, yang dibawa ke arah pemikiran ilmu pasti sehingga tercabut dari akar dan latar sosial budayanya. Karena positivisme memandang metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi "*sekadar*" merupakan *pseudoscientific*. bertentangan dengan hakekat ilmu sosial dan Ilmu kewarga negaraan sebagai pendidikan nilai sosial dan budaya. Pendidikan kahlak mulia warga negara Indonesia berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..

2.6. Paradigama Baru Revitalisas PKn Sebagai Pendidikan Ideolgi dan Pengembangan Pembelajaran Nilai Kebangsaan Pancasila

Diperlukan pardigma baru dalam upaya meakukan revitalisai Pendidika Kewarga megaraan. Perlu diperkuat dengan berlandasan pemikiran filosofik epistemologi, yang berhubungan dengan ilmu pendidikan ilmu keguruan dan ilmu sosial humaniora dan agama sebagai sumber nilai untuk membangun paradigma baru. Antara lain didsarkan atas pemikiran sebagai berikut;

- a. Perlu dilakukan transformasi orientasi pemikiran dari *mengajar kepada belajar* dengan memperankan peserta didik sebagai *subyek pembelajar* yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dirinya *secara kolektif dalam belajar kelompok*. Agar mampu menginternalisasikan nilai kebangsaan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila
- b. Kemampuan *berpikir kritis dan kreatif* dan nilai karakter Pancasilais paham kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar membangun akhlak mulia warga negara dapat dikembangkan, jika pembelajaran PKN berhasil menciptakan iklim belajar yang terbuka, demokratis, kompetitif berorientasi kepada proses belajar peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kapasitas dan kapabilitas dirinya sendiri berbasis nilai musyawarah dan mufakat dalam interaksi edukatif.
- c. Pengembangan nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn, akan efektif apabila nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan materi pelajaran dijadikan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan penalaran nilai sebagai proses pengembangan kemampuan menginternalisasikan dan internalisasi nilai.
- d. Sistem Nilai sebagai substansi pembelajaran akan penuh makna jika mengakses Nilai-nilai keagamaan sebagai sumber pembelajaran nilai Pancasila. Pengembangannya hendaknya dilakukan melalui upaya transformasi budaya belajar yang berbasis masalah aktual kewarganegaraan.
- e. Nilai-nilai keagamaan dan masalah kebangsaan dijadikan sumber nilai memperkaya setiap konsep materi PPKn dijadikan sebagai bahan kajian yang menarik dalam proses belajar, manakala hakekat PPKn sebagai pendidikan nilai kebangsaan berdasarkan nilai keimanan dan Ketaqwaan dan akhlak mulia warganegara Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- f. Pendekatan pendidikan ideologi diperkokoh dengan pandangan terhadap peserta didik sebagai subyek yang berfikir, bertindak, kreatif, konstruktif, dan manipulative, untuk membangun kecerdasan dan wawasan kebangsaan.
- g. PKN akan memiliki kekuatan penuh daya apabila berhasil pembelajarannya mentransformasikan Nilai-nilai kebangsaan meliputi makna kebangsaan Pancasila dan masalah praksis kebangsaan yang tumbuh dan berkembang sebagai latar masalah kewarganegaraan dijadikan sumber untuk memperkuat pembelajaran nilai dan wawasan kebangsaan.

2.7. . Inovasi Pembelajaran Pembelajaran Nilai kebangsaan dalam PPKn

Memperkokoh Sistem Nilai kebangsaan, Inovasi perlu dilakukan, dengan berorientasi pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran dari pengalaman yang ada, dengan dukungan penelitian dan evaluasi implementasi kurikulum, konsepsinya antara lain sebagai berikut;

- a. Inovasi pembelajaran perlu melibatkan secara optimal, guru sebagai inisiator dan inovator pembelajaran dengan memberikan peluang untuk mengembangkan kreatifitasnya, pengembangan profesional dengan menghormati otonomi dalam melakukan inovasi pembelajaran.
- b. Inovasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan merupakan jawaban strategis untuk mengimbangi pengembangan pembelajaran dengan pendekatan masalah selama ini, sekaligus menjawab tantangan dunia pembelajaran nilai kebangsaan dan akhlak mulia warga negara.
- c. Arah pengertian konseptual pembelajaran PPKn harus bermakna “sebagai pembelajaran nilai-nilai Pancasila, ilmu-ilmu sosial, humaniora teknologi dan serta nilai sosial budaya yang diorganisir secara kontekstual dengan nilai-nilai keagamaan

dengan dukungan ilmu keagamaan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun sistem nilai kebangsaan Pancasila sebagai pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) di Indonesia.

- d. Inovasi pembelajaran ke arah memperkuat daya dukung sumber pembelajaran pengembangan model berpikir induktif berbasis pemecahan masalah dan nilai-nilai kebangsaan aktual
- e. Inovasi pembelajaran hendaknya mengakses pada strategi pengembangan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menguasai IPTEKS, dengan mengutamakan membangun peningkatan keimanan dan ketakwaan dan kahlak mulia sebagai karakter PKn dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila

2.8. Paradigma Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila.

Gagasan konseptual untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Ideologi Pancasila dan pembelajaran nilai kebangsaan. Paradigma Revitalisasi PKn Sebagai Ideologi Pancasila, dalam penguatan nilai dan wawasan kebangsaan, antara lain sebagai berikut'

- a. Ideologi Pancasila memiliki kekuatan filosofik menangkal pengaruh negatif ideologi asing termasuk "neoideology"
- b. Warga Negara Indonesia memerlukan kecerdasan berideologi Pancasila dengan berpikir tingkat tinggi dan Menggunakan sistem nilai yang kokoh dalam memecahkan masalah Kewarganegaraan
- c. Pancasila merupakan Ideologi Terbuka memiliki makna memberikan peluang bagi PKn Membangun Suasana Pembelajaran untuk Mencerdaskan kehidupan berideologi Pancasila
- d. Kecerdasan berideologi Pancasila Diperlukan untuk memperkuat aktualisasi Ideologi Pancasila berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernilai yang mendalam
- e. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
- f. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam memperkuat PPKn (Citizenship education) . Intinya transformasi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
- g. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
- h. Ideologi Pancasila memberikan dukungan warga negara mampu melakukan interpretasi dan memecahkan masalah bernegara dan berbangsa, Kemampuan ini akan tumbuh melalui berpikir filsafat dan berpikir kreativitas dalam mengaktualisasikannya
- i. Pendidikan Ideologi Pancasila adalah merupakan salah satu pendekatan Dalam memperkuat PKN Citizenship. Intinya transformasi dalam Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
- j. Pendekatan ini dinilai tepat, sebab Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka memerlukan dukungan kemampuan berpikir kritis warga negara dan memperkuat berpikir kreatif dalam menemukan pola aktualisasinya dalam memecahkan masalah kewarga negaraan
- k. Rational dan Strategi Revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila , (a) Analisis filsafat dan etika Politik sistem politik dan Praktika Politik banyak dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya Liberalistik. (b) Pengaruh ini menguat dan merupakan dampak negatif dari eporia proses reformasi termasuk reformasi konstitusional . (c)

memunculkan sistem dan praktika politik biaya tinggi, dan tidak terkontrol oleh etika politik Pancasila

2.9. Makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Pembelajaran Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Kewarga Negara di Indonesia.

Berikut ini makna Pendekatan Pendidikan Ideologi Pancasila, sebagai pememikiran reflektif bagi revitalisasi. Antara lain sebagai berikut;

- a. Pendekatan untuk memperkuat epistemologi Ilmu Kewarga Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan
- b. Pendekatan dalam mengembagangkan Kurikulum dan Pembelajaran PKn dan Pengembangan mutu Pendidikan Guru PKn
- c. Secara Teoretik untuk mengembangkan Karakter Ideologi Pancasila warga negara Indonesia
- d. Untuk memperkuat peran dan makna PKn sebagai Pendidikan Nilai dan karakter Ideologi Pancasila
- e. Sebagai Pendekatan Untuk memperkuat posisi dan peran PKn dalam memperkuat ideologi Pancasila dalam Percaturan Ideologi dunia
- f. Sebagai Pendekatan PKn dalam membangun kecerdasan dan keterampilan berideologi Pancasila.
- g. Sebagai sebuah gagasan konseptual ilmu kewarganegaraan untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan. Praktek dan Aktualisasi Pancasila Sebagai Ideologi Selama ini berada dalam suasana pengaruh pergumulan ideologi di dunia termasuk "Neo Ideology"
- h. Memerlukan dukungan yang kuat dengan kemampuan dan kecerdasan warga negara berideologi Pancasila untuk menghadapi pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Untuk itu Pengembangan Kualitas Kecerdasan Berideologi Pancasila warga negara sangat penting dalam PKn perlu revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila

3 SIMPULAN

Kajian ini berkaitan dengan bagaimana upaya membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Nilai kebangsaan. Berkaitan dengan perubahan nilai sosial politik dan budaya yang dipercepat dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Implikasinya terhadap perkembangan paradigma dan pendekatan dalam Ilmu sosial, pendidikan IPS, Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kajian ini mengedepankan paradigma revitalisasi pembelajaran nilai bagi penguatan nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan *ideologi Pancasila dan pendidikan watak bangsa*. Kajian ini bertujuan memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai kebangsaan dengan mengkontruksi pendidikan ideologi Pancasila. Aktualisasinya dalam merancang bangun model pembelajaran dalam pembelajaran pemecahan masalah kewarganegara aktual, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tepatguna sesuai dengan tujuan membangun warga negara yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

4. DAFTAR PUSTAKA

Ersis Warmansyah (Ed.) (2016) *Developing Education Based on Nationalism Values*, ULM,

Banjarماسin

- Suwarma(2013) *Etika Politik*, Gelar Pustaka Mandiri Bandung
- (2015) *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustala Mandiri
- (2016) *Ideologi Pancasila* Gelar Pustaka Mandiri, Bandung
- (2016) *Revitalisasi PKN sebagai Pendidikan Ideologi Pancasila dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Guru*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Kongres AP3KNI Indonesia, Bandung Tanggal 15 November 2016
- (2016) *Paradigma Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspekti Glabalisasi Kajian Epistemologik dan Paradigmatik Revitalisasi PKN*, makalah Kuliah Umum 18 Agustus 2016 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- (2017) *Ilmu Kewarganegaraan (Ontologis dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan)*, Univeritas Pendidikan Indonesia, Bandung
- (2017) *Pendidikan Kewarganegaraan (Refleksi Inovasi dan Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan)* Universitas Pendidikan Indonesia
- (2017) *Building Character and Value Education Based on School and Social culture*, Presented in Internasional Seminar on Pasundan Univercity, Juni 16 -2017 Bandung
- (2017) *Model Buku Ajar PPKN Berbasis Ke Islaman dan Kemuhammadiyahahan Untuk Perguruan Tinggi*, Disajikan dalam Disajikan pada Forum Group Diskusi di UHAMKA, Jakarta 14 Juni 2017

UPAYA OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN UNTUK MENCAPI CAPAIAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI ¹

Hassan Suryono ²

Email: hassansuryono@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pemakalah berterima kasih kepada Panitia Seminar Nasional penguatan nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolah dan kemasyarakatan yang telah memberi amanah untuk menyajikan pemikiran pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sesuai dengan Tema yang ditetapkan .Pemakalah mengetahui dan paham , bahkan percaya para peserta Seminar nasional ini sudah mengerti, memahami dan bahkan sudah menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi . Jika demikian anggaphlah materi ini sebagai penyegaran dan pencerahan. Apa yang akan pemakalah kemukakan belum tentu para peserta Seminar nasional setuju dan menerima, bagi pemakalah tidak masalah, maksud pemakalah baik karena melaksanakan amanah dari ketua panitia seminar nasional .

Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata kuliah umum (P3MKU) mempunyai tugas salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan mata kuliah Umum yang terdiri dari mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia , Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD) , Ilmu Kealaman Dasar (IAD) dan Kewirausahaan .³.Jadi ada tiga kelompok mata kuliah yang dikelola dan dikembangkan oleh P3MKU yaitu kelompok pengembangan kepribadian ⁴, berkehidupan bermasyarakat. ⁵dan penciri Universitas.⁶

Kurikulum dalam hal ini substansi kajian menurut kelaziman sebaiknya harus diganti atau direkonstruksi kembali kalau sudah berlaku selama 5 tahun untuk disesuaikan dengan

¹ .Makalah dipresentasikan pada seminar nasional Penguatan nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan dan kemasyarakatan pada hari Sabtu 7 Juli 2018 di FKIP UNS

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di LPPMP Universitas Sebelas Maret

³ Mata kuliah Agama , Pancasila , Kewarganegaraan , Bahasa Indonesia. Termasuk kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Untuk Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD)serta IKD termasuk kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat , sedangkan mata kuliah Kewirausahaan sebagai ciri khas mata kuliah Universitas.

⁴ Kelompok mata kuliah ini berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 yo Nomor 43/Dikti/Kep/2006

⁵ Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/Dikti/Kep/2006

⁶ Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 713/J27.PP/2006 tentang penyelenggaraan kelompok mata kuliah umum Universitas Sebelas Maret

perkembangan Ipteks serta tuntutan pasar kerja. Kalau melihat ketentuan yang demikian sudah saatnya bahkan terlambat substansi kajian yang ada dalam surat Keputusan tersebut segera dirubah, diganti atau direkonstruksi. Perubahan itu untuk mensinkronkan dengan rumusan capaian pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta perkembangan kemasyarakatan termasuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Untuk merubah, mengganti atau merekonstruksi suatu substansi kajian mata kuliah perlu adanya kajian dan analisis substansi yang mana perlu diganti dan mana perlu dirubah atau direkonstruksi. Tidak mudah memang mensinkronkan substansi kajian dengan capaian pembelajaran baik sikap maupun ketrampilan umum. Karena mata kuliah umum harus juga bersinergi dan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran program studi yang setiap prodi mempunyai profil lulusan sendiri sendiri. Dalam makalah ini akan memberi konsep dasar implementasi sebagai pengalaman mengelola mata kuliah umum sebagaimana diminta oleh ketua panitia seminar nasional ini.

KAJIAN MATERI/ BAHAN AJAR

Sejak berlakunya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No 4 tahun 1950, Undang Undang No 12 tahun 1954, Undang Undang No 2 tahun 1989 dan Undang Undang No 20 tahun 2003 kesemuanya telah memberi acuan dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional sarat dengan Nilai kebangsaan /nasionalisme (keteladanan, kedisiplinan, sportivitas, tanggung jawab, keberanian) dalam kurikulumnya .

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan⁷. Kurikulum ini sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan⁸

Program studi dalam Pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan dapat dikontribusi oleh mata kuliah umum sebagai pendidikan umum/General education⁹. Kontribusi yang dimaksud adalah menetapkan substansi kajian MKU untuk disandingkan dengan capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi¹⁰

⁷ Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

⁸ Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁹. Kamal Abdul Hakam, 2016 menyatakan bahwa Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang harus diberikan pada setiap orang untuk setiap level pembelajaran dengan memberikan makna-makna esensial agar berkembangnya nilai, sikap dan pemahaman serta ketrampilan seseorang sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab serta sebagai warga negara yang demokratis

¹⁰ .Capaian pembelajaran dalam mata kuliah umum adalah rumusan sikap sebanyak 10 butir , ketrampilan umum sebanyak 9 butir dan pengetahuan MKU menguasai konsep /teoritik /MKU

Substansi kajian Kewarganegaraan terdiri dari a.Filsafat Pancasila, b.identitas nasional, c.Politik dan strategi, d.Demokrasi Indonesia, e.Hak azazi manusia dan *Rule of Law* ,f.Hak dan kewajiban warga negara, g.Geopolitik Indonesia dan h.Geostrategi Indonesia.¹¹ Sedangkan mata kuliah Pancasila 4.Substansi kajian Pancasila terdiri dari a.Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, b.Pancasila sebagai filsafat, c.Pancasila sebagai etika politik, d.Pancasila sebagai ideologi nasional ,e.Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, f.Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara¹²

Hasil persandingan antara capaian pembelajaran baik capaian sikap, ketrampilan dan pengetahuan dengan substansi kajian dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler¹³ Untuk memilih kegiatan mana yang akan dilakukan apakah ketiga tiganya, atau salah satu tentu seorang dosen MKU harus betul betul mengetahui tujuan pendidikan nasional ,tujuan program studi serta profil lulusan beserta deskripsi profil dari setiap program studi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum Pendidikan Tinggi apakah itu Universitas, Sekolah Tinggi ,Institut,Akademi dll diwajibkan memuat Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan¹⁴.Yang dimaksud mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideology bangsa Indonesia, sedangkan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila,Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air¹⁵

Pada tanggal 21 Desember 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan peraturan nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam lampirannya menentukan rumusan sikap dan ketrampilan umum.Untuk rumusan sikap secara logis berlaku untuk semua jenjang di pendidikan Tinggi baik itu program Diploma satu, dua ,tiga empat, sarjana terapan, program sarjana ,Program

¹¹ .Kep Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 .Substansi kajian mata kuliah ini dalam perkembangannya mengalami penambahan kajian karena perkembangan kemasyarakatan misalnya menambah kajian Anti korupsi , Radikalesme .Demikian juga ada buku PKN di Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

¹² . Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002.Substansi kajian mata kuliah ini juga mengalami dinamika perkembangan seperti mata kuliah Kewarganegaraan.

¹³ Kegiatan kurikuler merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi.kegiatan kokurikuler suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot .Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiaatan yang dilakukan mahasiswa sebagai penunjang kurikulum.

¹⁴ .Pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹⁵ .Penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Magister, Magister terapan, Program Doktor dan Doktor Terapan serta program Profesi, Spesialis dan SubSpesialis. Namun untuk ketrampilan umum masing masing jenjang berbeda satu sama lain.

Makalah ini disamping akan memuat rumusan sikap dan secara khusus akan menyampaikan ketrampilan umum program sarjana yang ada pada posisi 6, sedangkan ketrampilan yang lain dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri tersebut. Adapun rumusan sikap sebagai berikut 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, 4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa, 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 6. Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik, 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Sedangkan ketrampilan umum untuk program sarjana /level 6 adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi, 4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi, 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik dalam maupun di luar lembaganya, 7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya, 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesakitan dan mencegah plagiasi.¹⁶

¹⁶ Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut perlunya menetapkan dan mensinkronkan materi bahan ajar mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Sekarang ini rambu rambu mata kuliah tersebut sebagian besar masih berpijak pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 38 tahun 2002, tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di PT dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43 tahun 2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT dengan varian perubahannya

STRATEGI PEMBELAJARAN

Deskripsi kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana ditentukan dalam Perpres no 8 tahun 2012 merefleksikan capaian pembelajaran yang didapatkan seseorang melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri. Jadi capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi dari ilmu pengetahuan, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan terstruktur dalam suatu bidang ilmu atau melalui pengalaman kerja.

Capaian pembelajaran yang bersifat nasional (makro) sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicapai lewat proses pendidikan dengan mengkaji, menganalisis substansi kajian yang bersifat makro sebagai pisau analisis dengan metode deduksi. Namun untuk mencapai tujuan program studi sesuai dengan profil dan deskripsinya. Profil seorang dosen Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus benar benar memahami substansi kajian makro ke implementasi mikro dengan analisis induksi.

Metode deduksi dengan jalan memberikan konsep/ teori / mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan negara sesuai dengan bidangnya sedangkan dengan metode induksi mengemukakan fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Fenomena dan fakta yang dikemukakan harus menunjukkan keterkaitan dengan tujuan serta profil prodi yang bersangkutan. Melihat kenyataan ini kita bisa bertanya pada mahasiswa beberapa pertanyaan yaitu (1) Mengapa ? (Pengetahuan kausal) Mahasiswa diminta menjelaskan sebab dan akibat .(2) Kemana? (Pengetahuan normatif) Mahasiswa menjelaskan bagaimana seharusnya. (3) Apa ?(Pengetahuan essensial) mahasiswa menjelaskan hakekat sesuatu atau inti sarinya.(4) Bagaimana ? (Pengetahuan deskriptif) berarti mahasiswa diminta menjelaskan secara obyektif apa yang ditanyakan ¹⁷. Hal ini bisa dikatakan kita sudah melakukan praktik MKU berbasis prodi.

Baik untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada akhir pembelajarannya diadakan evaluasi baik dengan test , non test serta Portofolio .¹⁸ Bagaimana sekarang portofolio yang bersifat makro nasional dan mikro yang berbasis prodi. Seperti saya jelaskan di depan ada dua fakta yaitu fakta yang bersifat makro atau ruang lingkup nasional dan fakta yang bersifat mikro berbasis prodi. Apakah itu makro atau mikro mempunyai langkah langkah yang sama

¹⁷ Pertanyaan pertanyaan diatas menurut Kaelan merupakan tingkatan pengetahuan yang akan ditanyakan.

¹⁸ Test merupakan suatu prosedur yang sistematis guna mengukur sample. Ciri yang sistematis ini telah mencakup pengertian obyektif, berstandar dan kualitas yang lain. Teknik evaluasi dengan non test dapat memakai rating scale, kuessioner, check list, observasi dan riwayat hidup.

¹⁹.Identifikasi masalah dan masalah yang akan dibahas dalam portofolio hendaknya masalah masalah yang tidak sesuai dengan capaian sikap ,dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi ²⁰

KESIMPULAN

Seorang dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan sukses jika secara akademik mampu memberikan nilai tambah kepada capain pembelajaran program studi .Atau dengan kata lain dikatakan sukses kalau Mata kuliah tersebut ada kemanfaatan dan kontribusi terhadap lulusan program studi.Dosen mata kuliah tersebut hendaknya ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju dalam mengajarnya serta selalu berpikir untuk berbuat yang lebih baik dan bertujuan

Dalam merekonstruksi kurikulum kajian mata kuliah umum diperlukan adanya penetapan visi,misi dan tujuan mata kuliah umum, adanya relevansi yang sistematis antara profil lulusan dengan kompetensi.Kompetensi dengan elemen kompetensi .Elemen kompetensi dengan bahan kajian.Bahan kajian dengan Mata kuliah, (2) Bahan kajian Mata kuliah umum harus mampu mengembangkan nilai nilai pada setiap Mata kuliah umum yang telah ditetapkan.

REKOMENDASI

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hal hal sebagai berikut (1) Kurikulum mata kuliah umum hendaknya disusun dengan melibatkan komponen mahasiswa, dosen, stake holders dan jurusan/Fakultas.dan pakar pada setiap mata kuliah umum . (2) Perlu adanya uji coba pembelajaran kajian substansi pada setiap matakuliah umum untuk mengetahui apakah substansi kajian tersebut efektif dalam mengembangkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang tercantum dalam capaian pembelajaran

KEPUSTAKAAN

Depdiknas. 2002. *Penilaian berbasis kelas*. Jakarta : Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas

¹⁹ Langkah langkahnya adalah mahasiswa mengidentifikasi masalah, pilih satu atau dua lebih masalah yang akan dikaji, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan fortfolio , menyajikan portofolio dan merefeksi pengalaman belajar.

²⁰ Capaian pembelajaran sikap suatu yang seharusnya sedangkan fakta yang akan dibahas merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan sikap tersebut.Demikian juga ketrampilan umum merupakan ketrampilan yang harus dimiliki,seandainya merupakan fakta yang tidak sesuai dengan ketrampilan harapan tersebut.Lebih jelas dan terperinci dapat dilihat dalam lampiran rumusan capaian pembelajaran Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Kemenristekdikti Dirjen Belmawa, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Pancasila, Agama dan bahasa Indonesia.*
- Hassan Suryono dkk , 2016. *Pancasila berbasis riset tinjauan aspek hitoris, Yuridis dan Filosofis* sebagai mata kuliah wajib umum di Perguruan Tinggi. Surakarta : LPPMP Universitas Sebelas Maret
- Hassan Suryono, dkk. 2016. *Kewarganegaraan mata kuliah wajib umum di perguruan Tinggi.* Surakarta : LPPMP Universitas Sebelas Maret
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012. *Panduan Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),* Jakarta : Dirjen Dikti
- Kementerian Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ,2016. *Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan .* Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43 tahun 2006 tentang *rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT*
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 38 tahun 2002 ,*tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di PT*
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 44 tahun 2006 ,*tentang rambu rambu pelaksanaan kelompokn mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di PT*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang *perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang *kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Permenristekdikti NO 44 tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*
- Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

SERVICE LEARNING DALAM KOMUNITAS: MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY DI INDONESIA.

Rusnaini

Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Today, active citizenship requires that people are knowledgeable about common problems in his community and possess the capacity to work toward a solution by acting together to resolve the deficits exist within social systems. History records service learning by citizens as true solidarity. They have committed to promote civic responsibility is an individual's duty to the community.

Keywords: Active citizenship, civic engagement, service learning, civic responsibility

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai domain sosiokultural kewarganegaraan sejauh ini masih terpengaruh pada kurikulum *citizenship education*, bahwa isu pentingnya terletak pada bagaimana memahami isu-isu kewarganegaraan dan bukan pada bagaimana menjelaskan tantangan kewarganegaraan aktif yang harus kita hadapi hari ini dan esok. Kini, diskursus intelektual lebih terpusat pada bagaimana menjelaskan *civics engagement* untuk menghadapi tantangan kewarganegaraan aktif dalam komunitas yang disebut *civics community*. *Civics community* merupakan sebuah cabang studi kewarganegaraan yang menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dipahami sebagai komunitas yang terus berkembang, baik di tingkat daerah (lokal) maupun di tingkat nasional (Good, 1959). *Civics community* memiliki misi mempersiapkan generasi muda untuk mengembangkan pengetahuan dan skill untuk membangun komunitas. *Civics community* memfokuskan pada *civic engagement* atau keterlibatan warga sebagai salah satu bentuk *civic responsibility* atau tanggung jawab warga. Mengingat pedagogi *civic engagement* adalah *service learning*, artikel ini memaparkan tentang *service learning* sebagai upaya membangun *civic responsibility* di Indonesia.

TANTANGAN KOMUNITAS

Kita hidup dalam periode sejarah yang menunjukkan bahwa di zaman modern ini seorang warga negara tidak dapat mengharapkan dan mengklaim bebas dari tanggung jawab sosial karena ia hidup sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, seorang warganegara membutuhkan perspektif untuk memahami kewarganegaraan aktif. Kewarganegaraan aktif bermakna mengetahui tanggung jawab diri pribadi dalam kehidupan sosial, dan siap untuk belajar tentang masalah-masalah sosial yang berdampak pada komunitas atau masyarakat dan, jika memungkinkan, berpartisipasi dalam strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitasnya. Warga negara yang baik adalah anggota yang melakukan dengan baik bagiannya dalam kehidupan komunitas. Warga yang buruk adalah anggota yang menghambat kemajuan komunitas ketika dia seharusnya bisa membantu.

Di dalam komunitas, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu. Menurut Dunn (2002), haknya adalah apa yang diberikan komunitas padanya; kewajibannya adalah apa yang dia berikan kepada masyarakat. Setiap komunitas memiliki kebutuhan bersama, meskipun tidak semua warga komunitas menyadarinya. Sebagai contoh, kebutuhan akan hidup sehat, berhubungan dengan orang lain, pendidikan, ibadah, dan kemakmuran atau kesejahteraan. Kadang-kadang warga dari komunitas, atau sebagian besar dari mereka, tampaknya tidak sepenuhnya memahami kebutuhan bersama tersebut. Jika hal ini terjadi, akibatnya kebutuhan bersama tidak tercapai. Padahal hal yang esensial tentang suatu komunitas adalah bahwa orang-orang yang membentuknya bekerja sama untuk tujuan yang baik atau *common good*. Komunitas dalam masyarakat demokratis yang majemuk membutuhkan warga negara yang memahami identitas sosial mereka sendiri, berkomunikasi dengan mereka yang berbeda dari diri mereka sendiri, dan membangun jembatan lintas perbedaan untuk tujuan yang baik tersebut.

PEDAGOGI CIVIC ENGAGEMENT: SERVICE LEARNING

Civic Engagement atau keterlibatan warga merupakan kegiatan untuk membuat perubahan dalam kehidupan warga ataupun komunitas dan mengkombinasikan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dan motivasi guna membuat perubahan tersebut. Tindakan ini merupakan usaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat, “baik melalui proses politik maupun non-politik “ (Ehrlich, 2000). Adapun menurut Addler and Goggin (2005),

civic engagement atau keterlibatan warga mengacu pada cara di mana warga berpartisipasi dalam lingkungan hidup komunitas untuk meningkatkan kondisi sesama warga demi membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, *civic engagement* ini adalah proses menghubungkan individu dengan individu dalam masyarakat, untuk berbagi kepentingan bersama dan bekerja untuk kebaikan bersama. Istilah *civic engagement* ini digunakan terutama dalam konteks orang yang lebih muda. Pedagogi *civic engagement*, baik dalam bentuk *service learning* atau pembelajaran layanan adalah menggabungkan tujuan pembelajaran dan pengabdian masyarakat dengan cara yang dapat meningkatkan perkembangan warga dan kebaikan bersama. Dengan kata lain, strategi pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan layanan masyarakat yang sangat berarti dengan instruksi dan refleksi untuk menciptakan berbagai variasi pengalaman belajar, membentuk solidaritas sosial, dan membangun komunitas.

MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY DENGAN SERVICE LEARNING

Banyak studi yang dilakukan oleh para ahli menemukan adanya berbagai manfaat program *service learning*. Sebagai contoh, Lisman (1998) mengatakan bahwa *service learning* memiliki potensi untuk membantu pendidikan tinggi menjadi mitra komunitas yang otentik, berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu anggota masyarakat meningkatkan kehidupan masyarakat. Adapun Celio, Durlak, and Dymnick (2011) menemukan program *Service learning* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima bidang hasil: sikap terhadap diri, sikap terhadap sekolah dan pembelajaran, keterlibatan masyarakat, sosial keterampilan, dan kinerja akademik. Kemudian penelitian Ellerton, S., Figueroa, S., Greenwood, D., Fiume, P. (2016) menemukan perbedaan yang bermakna antara pelajar *non-service learning* dan pelajar *service learning*, khususnya dalam partisipasi warga. Intinya, *service learning* untuk mengembangkan disposisi untuk kewarganegaraan aktif (Mann and Casebeer, 2016). Birdwell, Scott dan Horley (2013) mengatakan kewarganegaraan aktif dapat didorong melalui pendidikan dan tindakan masyarakat, seperti *service learning*. *Service learning* adalah pedagogi yang kuat dan konsisten dengan falsafah "learning by doing" oleh John Dewey (Ehrlich, 1997).

Myhew dan Engberg (2011) juga menemukan *service learning* memiliki potensi untuk meningkatkan *civic responsibility*. *Civic responsibility* bermakna partisipasi aktif dalam kehidupan publik suatu komunitas secara terinformasi, berkomitmen, dan konstruktif, dengan fokus pada kebaikan bersama (Keagy, 2002). Studi yang dilakukan Huda et.al (2018)

dan berkontribusi pada konstruksi teoritis *civic responsibility* dengan wawasan dari *service learning*, mengemukakan tiga tahap inti untuk memahami dan memberikan wawasan tentang pentingnya kepemimpinan berbasis tanggung jawab kewarganegaraan, yaitu: “*strengthening commitment to work with a strategic plan in community engagement, nurturing creative thinking and professional skills with experiential leadership and enhancing leadership awareness with rational problem-solving*” (Memperkuat komitmen untuk bekerja dengan rencana strategis dalam keterlibatan warga, memelihara pemikiran kreatif dan keterampilan profesional dengan pengalaman kepemimpinan dan meningkatkan kesadaran kepemimpinan dengan pemecahan masalah yang rasional).

Menurut Lisman (1998), “kita harus mendidik siswa-siswa kita untuk memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan seperti *service learning*, dan membantu siswa kita untuk menjadi lebih dari sekadar siap kerja”. Sebagai contoh, pondok pesantren *Mambaus Sholihin* di Jawa Timur yang melaksanakan program *service learning* dengan cara mendelegasikan santri-santri ke desa-desa sekitar untuk berdakwah dan mengajar agama di beberapa Musholah dan Masjid (Mahzumi, 2016). Dengan program yang dinamakan *Imtihan ‘amali* ini, mereka membangun *civic responsibility*. Contoh lain adalah sekolah Dian Harapan yang membuat program yang dinamakan *Mission Service Learning* dengan melakukan misi dan pelayanan di Indonesia. Sejalan dengan ini, Wilcox (2011) mengatakan bahwa membangun *civic responsibility* ini baik untuk meningkatkan performance sekolah. Akan tetapi, program *service learning* belum banyak dijalankan di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren di Indonesia.

Berbeda halnya dengan sekolah dan pesantren, berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan program yang setara dengan *service learning* dalam bentuk program pengabdian masyarakat yang dinamakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program KKN ini semacam program *service learning* dengan pendekatan literasi-komunitas (Jones, McAllister and Lyle, 2016). Program-program ini [menawarkan potensi untuk membina civic responsibility karena memberikan peluang bagi siswa untuk terlibat langsung di komunitas mereka dan memenuhi kebutuhan komunitas sambil mempraktikkan ilmu mereka.](#) Sementara kita berasumsi bahwa *service learning* mempengaruhi *civic responsibility*, selanjutnya fokus dari tinjauan ini adalah pada penilaian efektivitas *service learning*. Efektivitas *service learning* sangat ditentukan oleh tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu: tahap persiapan, tahap aksi, dan tahap refleksi (evaluasi). Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, sudah saatnya untuk lebih memfokuskan pada tahap refleksi agar

institusi atau organisasi dapat memperoleh informasi tentang kegiatannya, dampaknya dan efektivitas kerjanya, sehingga dapat mengetahui pencapaiannya. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu kegiatan *service learning* sehingga dapat meningkatkan *civic responsibility* di masa depan.

Program lain yang setara dengan *service learning* adalah program *active citizens*. Konsep *active citizens* (warga yang senantiasa aktif dan berdaya dalam masyarakat) bisa dijadikan salah satu alternatif dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan di Indonesia. Yang dilakukan oleh *active citizens* adalah turut aktif dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, menjadi pengurus di dalam organisasi kecil di tingkat komunitas atau ikut membantu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat setempat adalah bentuk kegiatan yang dapat dilakukan para warga. British Council juga membuat program *Active Citizens* untuk melatih sekumpulan pemuda yang berasal dari berbagai negara di dunia. Program *Active Citizens* tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat, tetapi menjalin hubungan yang baik dengan mitra. Sebagai contoh, British Council telah melaksanakan program *Active Citizens* di Bali pada bulan Maret 2017.

SIMPULAN

Service learning sebagai salah satu upaya membangun *civic responsibility*, pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan dan transformasi individual. Warga yang berpartisipasi dalam program *service learning* merupakan pribadi yang siap dan responsif. Di beberapa tempat, *service learning* dengan pendekatan literasi-komunitas yang menerapkan inovasi pelayanan berbasis komunitas, memberikan banyak manfaat bagi komunitas.

REFERENSI

[Adler, R.P and Judy Goggin, J. \(2005\).](#) What Do We Mean By “Civic engagement”? *Journal of Transformative Education*. Volume: 3 Issue: 3, page(s): 236-253.

Birdwell, J. Scott, R, Horley, E (2013). Active Citizenship, education and service learning. *Education, citizenship, and social justice*. Volume: 8, Issue: 2, page(s): 185-199. <https://doi.org/10.1177/1746197913483683>

Celio, C.I, Durlak, J and Dymnick, A (2011). A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students. *Journal of Experiential Education* • 2011, Volume 34, No. 2. 10.5193/JEE34.2.164 pp. 164–181.

Dunn, A.W (2002). *Community Civics and Rural Life*. <http://www.gutenberg.org/ebooks/5088>

Ehrlich, T (2000). Civic Responsibility and Higher Education. American Council of Education: ORYX PRESS.

Ellerton, S., Figueroa, S., Greenwood, D., Fiume, P. (2016) "The Impact of Academic Service Learning on Community College Students." *Journal for Civic Commitment*, 24, 1-23.

Good, C.V (1959). *Dictionary of education*. New York: McGraw-Hill.

Jones, D, McAllister, L, Lyle, D (2016). Community-Based Service-Learning: A Rural Australian Perspective on Student and Academic Outcomes of Participation University of Sydney. *International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement* Volume 4 Issue 1. ISSN: 2374-9466 | <http://journals.sfu.ca/iarslce>

Mann, J, Casebeer, D (2016). Mapping civic engagement: A case study of service-learning in Appalachia. *Journal Education, Citizenship and Sosial Justice*. Vol 11. Issue 1.

Miftachul Huda, Kamarul Shukri Mat Teh, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, Badlihisam Mohd Nasir, (2018) "Transmitting leadership based civic responsibility: insights from service learning", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. 34 Issue: 1, pp.20-31, <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0079>

Lisman, D. (1998). *Toward a civil society: civic literacy and service learning*. Greenwood Publishing Group, Incorporated.

Myhew, M.J and Engberg, M.E (2011). Promoting the development of civic responsibility: infusing service-learning practices in first year "success" courses. *Journal of college development* 52(1):20-38.

Mahzumi, F (2016). *Imtihan 'amali, Service Learning ala Pesantren Mambaus Sholihin Gresik; Paradigman Kemanfaatan bagi Individu Lain*. ICON UCE 2016. Collaborative Creation Leads to Sustainable Change.

Keagy, E L (2002). A Practical Guide for Integrating Civic Responsibility into the Curriculum, from *The Journal for Civic Commitment*, edited by Karla Gottlieb and Gail Robinson, American Association of Community Colleges, Washington, D.C., 2002.

Wilcox, K.C. (2011). The Importance of Civic Responsibility in Higher Performing Middle Schools: An Empirical Study. *Journal Education and Urban Society*. Volume 43. Issue 1